



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Pamularsih No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Fax. 7622536  
e-mail : dpppadaldukkb@jatengprov.go.id website : dp3akb.jatengprov.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MELATI DIAH PAMUNGKAS, S.E, M.M

Jabatan : Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. EMA RACHMAWATI, M.Hum

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,  
Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi  
Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 30 Januari 2026

Pihak Kedua  
Kepala Dinas Pemberdayaan  
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana  
Provinsi Jawa Tengah

Dra. EMA RACHMAWATI, M.Hum  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660517 199008 2 001

Pihak Pertama  
Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan  
Perlindungan Perempuan

Melati Diah Pamungkas, S.E, MM  
Penata Tingkat I  
NIP. 19850516 200901 2 010

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Unit kerja : Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Provinsi	Persentase Anggaran Responsif Gender di Perangkat Daerah Provinsi	12 %
1.1	Meningkatnya Kapasitas Perempuan di Bidang Ekonomi	Persentase Perempuan yang difasilitasi pelatihan menjadi wirausaha	80 %
2	Meningkatnya jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan di tingkat Kabupaten/Kota sesuai standar	Persentase UPTD PPA kabupaten/kota sesuai standar layanan	85 %
3	Meningkatnya komitmen Kabupaten/Kota dalam pembangunan ketahanan keluarga	Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan terkait ketahanan keluarga	20%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 2.698.800.000	APBD
2. Perlindungan Perempuan	Rp 634.392.000	APBD & DAK-NF
3. Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp 312.808.000	APBD

Semarang, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah



Dra. Ena Rachmawati, M.Hum  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660517 199008 2 001

Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan

Melati Diah Pamungkas, S.E, MM  
Penata Tingkat I  
NIP. 19850516 200901 2 010



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Pamularsih No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Fax. 7622536  
e-mail : dpppadaldukkb@jatengprov.go.id website : dp3akb.jatengprov.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Asteria Dewi Rusrinawati, S.Psi, M.Psi

Jabatan : Ketua Kelompok Kerja Perlindungan Perempuan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Melati Diah Pamungkas, S.E, MM

Jabatan : Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan  
Perlindungan Perempuan

Melati Diah Pamungkas, S.E, MM  
Penata Tingkat I  
NIP. 19850516 200901 2 010

Pihak Pertama,  
Ketua Kelompok Kerja  
Perlindungan Perempuan

Asteria Dewi R, S.Psi, M.Psi  
Pembina  
NIP. 19720814 1999012 001

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Unit kerja : Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	<b>KEGIATAN</b>		
1	Meningkatnya kab/kota yang mengimplementasikan rumah perlindungan perempuan di kecamatan	Persentase Kecamatan yang mempunyai rumah perlindungan perempuan	25 %
2	Meningkatnya jumlah lembaga penyedia layanan di Kabupaten/Kota yang terstandarisasi	Jumlah lembaga penyedia layanan yang terstandarisasi	15 unit
	<b>SUB KEGIATAN</b>		
1	Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	1 Dokumen
2	Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	35 orang
3	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	5 kegiatan
4	terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	15 orang

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi		
5	terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1 dokumen
6	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	5 lembaga

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp 115.750.000	APBD
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Rp 518.642.000	APBD & DAK-NF

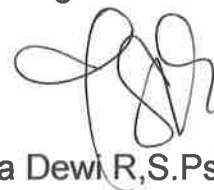
Semarang, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Kesetaraan Gender  
dan Perlindungan Perempuan



Melati Diah Pamungkas, S.E, MM  
Penata Tingkat I  
NIP. 19850516 200901 2 010

Pihak Pertama,  
Ketua Kelompok Kerja  
Perlindungan Perempuan



Asteria Dewi R, S.Psi, M.Psi  
Pembina  
NIP. 19720814 1999012 001